

SIMPOSIUM NASIONAL



PANCASILA DAN ETIKA POLITIK KATOLIK

STUDI LINTAS AGAMA BERPARADIGMA PANCASILA
SIGMA Pancasila - BPIP RI
12 SEPTEMBER 2020

PANCASILA

DILIHAT DARI SUDUT AGAMA KATOLIK

Oleh:
Franz Magnis-Suseno

PENGANTAR

Lima sila Pancasila dalam Undang-Undang Dasar ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sehari sesudah Sukarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia sebagai keyakinan-keyakinan filosofis dan etis paling dasar yang mempersatukan bangsa Indonesia. Karena itu Pancasila adalah jaminan ideologis yang mempersatukan ratusan komunitas etnik, budaya serta sekian komunitas agama dan orientasi relijius yang membentuk bangsa Indonesia, serta mendirikan dan mendukung Negara Indonesia. Karena cita-cita dan nilai-nilai dasar itu dimiliki dan diyakini oleh seluruh komponen bangsa Indonesia yang begitu majemuk, bangsa Indonesia bisa bersatu dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai hari ini kokoh berdiri.

Pancasila merupakan rumusan filsafat bangsa yang memainkan peran kunci dalam memungkinkan dan mendasari persatuan bangsa Indonesia. Itulah fungsi Pancasila. Akan tetapi Pancasila hanya dapat menjalankan fungsi itu karena dua syarat terpenuhi olehnya. Yang pertama: Pancasila betul-betul berakar dalam nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kepercayaan-kepercayaan komunitas-komunitas etnik, budaya dan religius bangsa Indonesia. Jadi Pancasila bukan pikiran cerdas seorang filosof atau sekelompok politisi yang dari atas ditetapkan kepada ideologi bangsa. Pancasila bukan sebuah ideologi abal-abal. Pancasila, sebelum dirumuskan, sudah berakar dalam hati bangsa Indonesia. Karena itu rumus Pancasila seperti akhirnya ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 disambut sebagai rumusan tepat nilai-nilai, cita-cita dan etika bangsa Indonesia sendiri. Pancasila kuat karena berakar dalam hati manusia-manusia Indonesia.

Yang kedua. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, di mana masyarakat menganut pelbagai agama dan keyakinan religius. Agama-agama di Indonesia adalah agama-agama mondial, bukan agama buatan Indonesia. Agama Islam, Hindu, Kristiani baik Protestan maupun Katolik, Buddha, Konghucu semua mempunyai pandangan, keyakinan dan tuntutan mengenai apa yang bernilai, apa yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan manusia, apa ukuran keberhasilannya (di hadapan Tuhan), apa sikap dan tindakan yang benar dan mana yang tidak benar. Agama-agama

juga merasa wajib "memurnikan" dan "mengangkat" nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan komunal.

Oleh karena itu sangat perlu Pancasila didukung oleh agama-agama yang ada di Indonesia. Kalau Pancasila, atau sebagiannya, tidak didukung oleh keyakinan agama manusia Indonesia, maka semakin seseorang atau sekelompok orang beragama tidak mendukungnya, Pancasila semakin tidak akan berarti baginya, barangkali malah ditolak. Dengan sendirinya Pancasila tidak akan bisa menjalankan fungsinya, fungsi dasar sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Dan sebaliknya, kalau cita-cita dan keyakinan-keyakinan etis Pancasila didukung oleh agama, orang-orang dan kelompok beragama itu akan dengan yakin, mantap dan gembira mendukung Pancasila dan bersedia menjadi warga negara ber-Pancasila. Oleh karena itu sangat perlu Pancasila dilihat dari sudut agama-agama yang dianut oleh bangsa Indonesia.

ETIKA POLITIK KATOLIK

Makalah ini bertanya bagaimana Pancasila kalau dilihat dari perspektif Katolik. Pertanyaan ini sebenarnya dapat dijawab dengan pendek. Sejak semula, artinya sejak 1945, warga, ya umat Katolik Indonesia, mendukung Pancasila. Monseigneur Albertus Soegijapranata, Uskup Agung Semarang yang 1946 pindah dari Semarang ke Yogyakarta, untuk berada di pusat Republik dan menegaskan dukungannya pada Republik, seorang sahabat pribadi Soekarno yang 1964 dinyatakan pah-

lawan nasional, sejak semula bersemangat besar mengenai Pancasila. Dan begitu umat Katolik sampai sekarang. Tidak hanya karena mau setia pada cita-cita dasar Indonesia, melainkan karena Pancasila memang amat sesuai dengan cita-cita etika politik Katolik.

Berikut ini saya akan menjelaskan etika politik yang boleh dikatakan disepakati betul oleh Gereja Katolik. Disepakati? Keyakinan-keyakinan Katolik mengenai sekian bidang kehidupan manusia berkembang dalam waktu. Dari pendekatan-pendekatan dasar yang kami -"kami" di sini adalah "kami Katolik"- temukan dalam Injil dan Perjanjian Baru, yang berdasarkan apa yang dipermaklumkan Yesus, umat Katolik, melalui refleksi iman, terus-menerus mencari apa implikasinya dalam situasi-situasi yang, selama sejarah 2000 tahun, terus berubah dan berkembang (misalnya apa implikasi ajaran Yesus bahwa Ia sendiri ditemukan dalam orang-orang miskin, kalau ditanyakan apa yang merupakan upah yang adil bagi buruh industri yang 2000 tahun lalu belum ada).

Etika sosial-politik Gereja Katolik dapat dikatakan melalui tiga tahap perkembangannya. Tahap pertama yang berlangsung sampai permulaan abad ke-19 dapat disebut **tahap karitatip**. Umat Kristiani sejak permulaan sadar betul bahwa daripadanya dituntut *caritas*, kasih dan perhatian kepada mereka yang butuh. Berdasarkan perintah Yesus: "cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri", dengan contoh orang

Samaria yang merawat seseorang yang dirampok dan dilukai oleh begal (Mk. 12: 28-31; Luk. 10: 25-37). Begitu sejak generasi Kristiani pertama kita membaca bahwa umat memperhatikan para yatim-piatu, orang-orang sakit dan miskin, orang dalam penjara. Orang miskin harus diberi derma, bagi orang sakit dibukakan rumah sakit, bagi yang tak punya rumah diusahakan rumah penginapan, para mantan pelacur ditampung dan dibantu. Semuanya itu dianggap kewajiban berat. Orang-orang yang dianggap *santo* dan *santa* - orang suci dekat Tuhan -selalu diukur dari apa mereka mempunyai hati bagi mereka yang menderita dan terlantar.

Akan tetapi sejak permulaan abad ke-19 semakin disadari bahwa pendekatan karitatip itu tidak mencukupi. Bukan hanya Karl Marx yang melihat akibat buruk kapitalisme purba. Eksploitasi buruh industri tidak dapat diatasi dengan derma atau dapur di jalan. Orang-orang Gereja mulai memikirkan bagaimana seharusnya perekonomian harus ditata. Tahap kedua ini dapat disebut **tahap normatip** etika sosial politik Gereja Katolik. Gereja menyadari bahwa masalah buruh industri bukan sekedar masalah kemiskinan, melainkan masalah keadilan. Gereja mulai bertanya apa yang menjadi upah yang adil. Bagaimana seharusnya, dalam cahaya injil, hubungan kerja industrial ditata? Hasil refleksi itu adalah *Ajaran Sosial Gereja Katolik*. Teksnya yang pertama adalah ensiklik tulisan Paus Leo XIII "Rerum Novarum" di mana liberalisme dan sosialisme ditolak dan ditulis bahwa upah

yang adil adalah upah yang mencukupi agar buruh bersama dengan keluarganya dapat hidup secara manusiawi. Sekaligus, amat penting, *Rerum Novarum* menegaskan hak buruh untuk bebas membentuk serikat buruh (dalam penilaian penulis ini ajaran sosial Gereja itu lebih berpengaruh dalam perkembangan hubungan sosial industrial di abad ke-20 daripada teori Karl Marx dengan model hancurkan lawan). Ajaran ini kemudian terus berkembang, dengan perkembangan tantangan ekonomis, sosial dan politik yang semakin cepat di abad ke-20.¹

Abad ke-20 menjadi abad ideologi-ideologi keras yang menjadi pegangan segala macam gerakan radikal yang mengusahakan perubahan. Abad ke-20 penuh perebutan, kekerasan, perang. Ideologi-ideologi paling utama adalah Marxisme-Leninisme dan, di bagian pertama abad lalu, fasisme, dengan nasional-sosialisme Jerman sebagai ekstrem. Di daerah-daerah terjajah gerakan-gerakan berdasarkan ideologi-ideologi pembebasan memperjuangkan kemerdekaan. Ber-

¹ Dokumen-dokumen terpenting adalah: "*Rerum Novarum*" [Leo XIII 1891, tentang masalah kaum buruh], "*Quadragesimo Anno*" [Pius XI 1933, juga tentang masalah perburuhan], "*Mater et Magistra*" [Johannes XXIII 1961, tentang masalah-masalah sosial di dunia], "*Pacem in Terris*" [Johannes XXIII 1963, tentang perdamaian dan hak-hak asasi manusia], "*Gaudium et Spes*" [Konsili Vatikan II 1965, tentang sikap Gereja Katolik terhadap dunia modern], "*Populorum Progressio*" [Paulus VI 1967, tentang keadilan internasional], "*Octogesima Adveniens*" [Paulus VI, tentang masalah keadilan internasional], "*Laborem Exercens*" [Johannes Paulus II 1981, tentang perburuhan], "*Sollicitudo Rei Socialis*" [Johannes Paulus II 1987, tentang arti pembangunan yang sebenarnya], "*Centesimus Annus*" [Johannes Paulus II 1991, tentang perkembangan ajaran sosial Gereja], "*Laudato Si*" [Franciscus 2025, tentang kewajiban memelihara lingkungan].

hadapan dengan situasi itu Gereja Katolik menyadari bahwa pendekatan normatif tidak cukup, bahkan tidak akan efektif sama sekali. Tak cukup mengajar bagaimana seharusnya. Dari orang-orang Katolik dituntut keterlibatan nyata untuk membebaskan dunia dari ketidakadilan dan penindasan dan secara nyata membuat dunia lebih manusiawi. Dengan demikian Gereja Katolik masuk ke tahap ketiga: **tahap tanggungjawab sosial politik**. Bukan dalam arti bahwa Gereja sebagai institusi harus berpolitik. Justru tidak. Tetapi dalam arti bahwa orang-orang Katolik di negara mereka masing-masing, sesuai dengan situasi masing-masing, wajib memperjuangkan keadilan serta hormat terhadap martabat manusia. Orang Katolik diharapkan melibatkan diri dalam usaha untuk menghapuskan kemiskinan (*preferential option for the poor*), ketertindasan dan diskriminasi. Begitu misalnya Paus Paulus VI mengecam kapitalisme (kita sekarang akan mengatakan neoliberalisme, *Populorum Progressio* 1967). Pernyataan resmi Gereja Katolik terakhir yang amat menge-sankan adalah ensiklik *Laudato Si* Paus Franciscus (2015) yang mengangkat tantangan perusakan lingkungan hidup secara menyeluruh dan menuntut agar penjagaan lingkungan hidup menjadi salah satu prioritas umat manusia.

Peristiwa paling menentukan bagi Gereja Katolik adalah Konsili Vatikan II 1962-1965 di mana semua uksup Gereja Katolik (waktu itu sekitar 3000) bertemu. Dalam Vatikan II itu Gereja Katolik seakan-akan secara resmi menempatkan

diri di abad ke-20 dengan segala tantangan. Ada dua dokumen Konsili yang di sini relevan: *Dignitas Humanae* yang menjadikan kebebasan beragama suatu prinsip dasar etika politik Katolik. Dan teks besar *Gaudium et Spes* tentang "Gereja di dunia dewasa ini" di mana Gereja Katolik mendukung hak-hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial dan menolak perang.

Inti etika politik Gereja Katolik dapat dirumuskan adalah tiga keyakinan: *Pertama*: Manusia dalam situasi apa pun wajib keras diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, dan itu berarti: Gereja Katolik menyatakan hormat terhadap hak-hak asasi manusia sebagai kewajiban mutlak. *Kedua*: kita wajib untuk mewujudkan solidaritas dengan orang yang miskin, terlantar dan tertindas, hal mana juga berarti: kita wajib mengusahakan keadilan sosial. *Ketiga*, manusia berkewajiban berat memelihara keutuhan lingkungan hidup yang merupakan titipan Ilahi terhadap manusia. Tuntutan dasar ini saya rumuskan dalam tujuh prinsip etika politik Katolik berikut:

(1) Prinsip Kebaikan Hati. Orang Katolik diharapkan mewujudkan sikap-sikap Yesus dalam praktek kehidupannya. Itu berarti, ia harus bersikap baik terhadap siapa pun, kawan maupun lawan. Dalam dimensi politik ia harus mengusahakan agar keadilan, kebahagiaan, kebebasan dan perdamaian semua bertambah. Dalam kehidupan politik pun orang Katolik dituntut bersedia memaafkan, mencari damai, untuk

menghormati lawan. Di sini juga termasuk penolakan terhadap pemakaian kekerasan. Konflik-konflik yang muncul wajib dipecahkan secara *damai*. Berarti lewat musyawarah, dan kalau musyawarah tidak berhasil, dengan memakai jalan hukum. Pemakaian ancaman, pemerasan dan paksaan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan harus ditolak.²

(2) Berpihak pada kehidupan. Orang Katolik tidak memakai kematian sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu orang Katolik menolak abortus dan pembunuhan janin demi tujuan penelitian. Gereja Katolik, akhirnya (!), juga mengharamkan hukuman mati.

(3) Kesejahteraan umum merupakan prinsip paling umum ajaran sosial-politik Gereja. Yang dimaksud adalah: Negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, negara ada demi kebutuhan masyarakat. Negara adalah bagi manusia, bukan manusia bagi negara - melawan semboyan fasisme Nazi-Jerman "kau sendiri tak berarti, bangsamu adalah segala-galanya". Kepentingan umum harus didahulukan terhadap kepentingan pribadi, juga terhadap kepentingan golongannya atau kepentingan partainya. Dalam prinsip itu terimplikasi bahwa politisi Katolik tidak boleh ikut korupsi. Politisi Katolik berpolitik demi kesejahteraan masyarakat dan tidak memakai

² Kekerasan hanya boleh dipergunakan oleh alat-alat negara apabila tidak bisa dihindari, itu pun atas dasar hukum yang berlaku.

kesempatan yang barangkali ada untuk secara tidak sah memperkaya diri.

(4) **Prinsip solidaritas.** Prinsip ini menegaskan pewujudan **keadilan sosial** sebagai tujuan pertama pembangunan. Pembangunan harus demi eksistensi pantas seluruh masyarakat. Kita hanya maju kalau kita maju bersama, senasib-sepenanggungan. Karena itu prinsip solidaritas menuntut bahwa prioritas segala pembangunan harus agar segenap warga dibebaskan dari kemiskinan, keterlantaran, ketidakberdayaan, ketertindasan.

(5) **Prinsip hormat terhadap hak-hak asasi manusia.** Hak-hak asasi adalah segi-segi kemanusiaan yang harus dijamin agar martabatnya sebagai ciptaan Allah tidak dilecehi. Hormat terhadap hak-hak asasi segenap warga masyarakat adalah terjemahan sikap hormat terhadap martabatnya sebagai manusia. Karena itu suatu pembangunan yang mengorbankan hak-hak asasi beberapa orang harus, dengan dalih kepentingan umum, mutlak ditolak. Terimplikasi dalam prinsip itu adalah hormat terhadap hak rakyat untuk ikut menentukan sendiri siapa yang memimpinnya dan ke arah mana, jadi hak atas demokrasi.

(6) **Prinsip subsidiaritas.** Prinsip ini mengatakan bahwa lembaga lebih tinggi wajib membantu lembaga-lembaga lebih rendah sejauh mereka tidak dapat sendiri menyelesaikan keperluan-keperluan mereka. Dan, dari sudut terbalik,

tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara memuaskan oleh lembaga-lembaga lebih rendah, tidak boleh diambil alih oleh lembaga lebih tinggi. Prinsip itu misalnya menjadi latar belakang "otonomi daerah". Apa yang dapat dikerjakan oleh propinsi, jangan ditarik ke pusat oleh pemerintah nasional. Dan apa yang dapat diselesaikan di tingkat kelurahan, bukan urusan bupati.

(7) Prinsip tanggungjawab atas keutuhan lingkungan hidup. Bahwa lingkungan hidup menjadi tanggungjawab manusia baru mulai disadari sejak sekitar limapuluh tahun. Yang pertama kali membuat publik umum sadar bahwa *something is very wrong* adalah buku ***Silent Spring*** yang ditulis Rachel Carson tentang akibat buruk obat pemberantas hama.³ Gereja Katolik mulai memberikan perhatian pada kewajiban memelihara lingkungan hidup sejak di tahun 90-an. 2015 Paus Franciscus menulis ensiklik dahsyat *Laudato Si* yang menempatkan penjagaan lingkungan hidup sebagai titipan Ilahi sebagai kewajiban primer manusia. Bisa dikatakan bahwa Gereja Katolik sekarang meyakini *dua kewajiban* paling dasar: Solidaritas atau perhatian pada mereka yang

³ Di Wikipedia ditulis: *Silent Spring* is an environmental science book by Rachel Carson (Boston, Mass.: Houghton Mifflin 1962), documenting the adverse environmental effects caused by the indiscriminate use of pesticides. Carson accused the chemical industry of spreading disinformation, and public officials of accepting the industry's marketing claims unquestioningly.

miskin dan tertindas, dan penjagaan keutuhan lingkungan hidup.

Perlu ditegaskan bahwa etika politik Kristiani yang saya rumuskan dalam tujuh prinsip itu diyakini bukan sebagai etika khusus bagi orang Katolik, melainkan sebagai tuntutan moral universal (sesuai dengan penegasan filosof Immanuel Kant [1724-1804] bahwa sesuatu hanya merupakan prinsip etika apabila bisa diberlakukan secara universal). Maka yang disebut "etika politik Katolik" sebenarnya adalah "etika kemanusiaan yang diyakini Katolik dan berlaku, serta diharapkan dirangkul, oleh segenap manusia".

KESATUAN PANDANGAN DASAR - PLURALITAS OPSI

Melihat etika politik di atas, menjadi jelas: Gereja Katolik tidak mempunyai satu model bagi "negara Katolik" atau pun "perekonomian Katolik". Yang ada pada Gereja adalah tujuh prinsip itu. Bagaimana tujuh prinsip itu dibikin nyata adalah urusan orang-orang Katolik sendiri. Tak ada model tertentu. Adalah Paus Johannes Paulus II (1979-2005) menegaskan bahwa tidak ada "model-model pembangunan Katolik", jadi tidak ada "negara khas Katolik", "ekonomi khas Katolik", "masyarakat khas Katolik". Konsili Vatikan II sudah menulis dengan tegas:

"Masyarakat politik dan Gereja di bidangnya masing-masing tidak bergantung satu sama lain, mereka otonom masing-masing. Akan tetapi keduanya, -meskipun ber-

dasarkan alasan yang berbeda-beda- melayani panggilan pribadi dan sosial manusia yang sama."⁴

Hal itu mempunyai implikasi bagi partisipasi orang Katolik dalam kehidupan bernegara. Di satu pihak, dalam berpolitik orang Katolik tidak berada di bawah wewenang pimpinan Gereja. Uskup dan Sri Paus pun tidak dapat memerintahkan kepadanya apa yang harus dilakukannya. Orang Katolik sendiri, berdasarkan suara hatinya sebagai orang Katolik, harus menentukan sikapnya. Jadi Gereja tak bisa memberi perintah pada orang Katolik bagaimana ia harus berpolitik. Akan tetapi di lain pihak suara hati politisi Katolik harus dididik supaya sesuai dengan pandangan dasar politik Gereja. Dalam menentukan sikapnya, ia harus berorientasi pada prinsip-prinsip etika politik kristiani tadi.

Dengan demikian orang politik bergerak secara politis di bawah kerangka konstitusional, hukum serta sesuai dengan budaya bangsanya sendiri. Maka di antara orang Katolik boleh saja ada perbedaan opsi dan pendapat politik. Kalau dulu kebanyakan warga Katolik Indonesia mengikuti Partai Katolik, tetapi selalu juga ada yang memilih PNI atau Marhaen. Yang harus selalu menjadi pedoman adalah etika politik seperti saya ringkaskan dalam tujuh dalil di atas. Maka dalam demokrasi pasca-Reformasi orang Katolik memilih

⁴ Gaudium et Spes (GS), Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II tentang Gereja di dalam dunia dewasa ini, nr. 76.

sendiri kalau mau masuk kehidupan politik. Orang Katolik misalnya mau masuk PKS -yang menyatakan mendapat inspirasi dari Ikhwanul Muslimin- tidak ada larangan asal ia sebaik mungkin berusaha membuat nyata pedoman etika yang diyakini Katolik. Orang Katolik bisa saja mempunyai pandangan politik berbeda-beda, tetapi pandangan dasar mesti sama.

Itu juga berarti bahwa Gereja Katolik **tidak mempunyai suatu ideologi politik sendiri**. Yang saya rumuskan sebagai tujuh prinsip etika politik Katolik bukan sebuah ideologi. Tujuh prinsip itu tidak mengatakan bagaimana suatu negara secara kongkret menata diri, bagaimana cara rakyat berpartisipasi, misalnya pakai sistem multi-partai atau mono-partai.

Maka orang Katolik akan mengikuti ideologi resmi negaranya, asal saja ideologi itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kenegaraan yang etis. Suatu ideologi yang secara eksplisit memuat tuntutan yang menyangkal salah satu dari tujuh prinsip yang saya rumuskan di atas akan ditolak oleh orang Katolik dan bisa secara resmi ditolak oleh Gereja. Di situ termasuk ideologi-ideologi totaliter seperti Marxisme-Leninisme, fasisme, segala bentuk rasisme (seperti apartheid), kolektivisme, pendewaan negara, militarisme, chauvinisme. Setiap ideologi negara yang tidak menghormati hak-hak asasi manusia, tidak memprioritaskan keadilan sosial atau tidak mengakui kebebasan beragama harus ditolak.

Kesimpulannya, umat Katolik tidak memerlukan landasan bernegara lain daripada yang menjadi landasan seluruh bangsanya. Karena itu, Gereja Katolik di Indonesia sejak 1945 mendasarkan diri pada Pancasila dalam keikutsertaan dalam kehidupan bangsa.

Mari kita sekarang melihat dengan lebih rinci, mengapa lima sila Pancasila sejak semula didukung oleh umat Katolik Indonesia dengan begitu bersemangat.

PANCASILA, ETIKA BANGSA INDONESIA YANG (NYARIS) SEMPURNA

Apakah, mengapa, dan dalam arti apa Pancasila merupakan etika bangsa yang -nyaris- sempurna? Tetapi sebelum saya mencoba menjawab pertanyaan ini, perlu saya jelaskan kata "nyaris" tadi.

ADAKAH YANG KURANG DALAM PANCASILA?

Pancasila memang ada kekurangannya. Yaitu, dalam Pancasila belum termuat apa yang di atas saya sebut sebagai prinsip ke-tujuh: Prinsip tanggungjawab atas keutuhan lingkungan hidup. Dalam Pancasila seharusnya ada, tetapi tidak terungkap, perhatian pada lingkungan hidup.

Akan tetapi ketidaksempurnaan itu bukan suatu kelalai-an. Di tahun 1945 etika politik Katolik juga tidak mengenal prinsip ke-tujuh itu. Alasannya sederhana: Seperti saya sebut di atas, bahwa keutuhan lingkungan hidup merupakan

tantangan mutlak bagi umat manusia di tahun 1945, di tahun Pancasila dirumuskan, belum disadari sama sekali. Kesadaran bahwa ada masalah dengan lingkungan hidup baru mulai sekitar 20 tahun kemudian, di tahun 60-an. Sekarang kita di Indonesia sadar betul bahwa lingkungan hidup memerlukan perhatian sepenuhnya, dan bahwa, kalau perhatian itu tidak diberikan, kita di Indonesia pun akan terancam secara serius.

Apakah tanggungjawab terhadap lingkungan hidup dapat ditampung dalam kerangka Pancasila? Menurut saya pribadi dapat, dan yang paling cocok adalah di sila kedua: *Ke-manusiaan yang adil dan beradab*. Sila itu menuntut agar kita, manusia, selalu membawa diri secara beradab. Nah, beradab tentunya tidak hanya terhadap manusia lain, melainkan juga terhadap alam yang dititipkan Tuhan kepada kita, jadi terhadap lingkungan hidup. Sebagai makhluk beradab kita bertanggungjawab atas keutuhan dan keselamatan alam. Sebagai orang beragama kita menyadari bahwa Allah Pencipta menyerahkan alam ke tanggungjawab kita, tidak untuk dirusak dan dikotori -dan akhirnya mematikan kita sendiri yang juga bagian alam,- melainkan untuk memelihara dan merawatnya.⁵

⁵ Dalam Kitab Kejadian, Kitab pertama Perjanjian Lama, Allah mengatakan kepada manusia yang baru diciptakan: "Beranak-cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah ini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi" (Kej. 1: 28). Tentulah "berkuasalah" tidak

PANCASILA DAN PERSATUAN BANGSA

Pancasila dapat dilihat dari dua segi: dari segi fungsi dan dari segi lima silanya - yang tentu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Perhatian pada fungsi Pancasila sangat penting. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Bung Karno bukan karena Beliau -memang- senang berfilsafat. Melainkan untuk memecahkan sebuah pertanyaan yang serius: Apakah Indonesia yang mau diproklamasikan itu akan didirikan di atas agama - yang tentu agama Islam, yang dengan sekitar 87 persen penduduk adalah mayoritas sangat besar, - atau atas dasar suatu kebangsaan yang murni sekuler. Jawaban Bung Karno: dua-duanya tidak, melainkan Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Perlu diperhatikan bahwa cetusan Bung Karno pada tanggal 1 Juni itu diterima dengan gembira oleh semua anggota BPUPKI. Dalam Panitia Sembilan kemudian Pancasila diberi rumusan yang definitif, disepakati oleh semua. Kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa: Di pagi hari tanggal 18 Agustus, sebelum PPKI bertemu untuk menetapkan undang-undang dasar bagi Indonesia yang baru sehari diproklamasikan kemerdekaannya, Bung Hatta memanggil lima tokoh Islam dan minta mereka untuk menyetujui bahwa tujuh kata yang sudah disepakati oleh semua - "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi peme-

dimaksud berkuasa seperti serigala atau musang yang menghabiskan dan mematikan apa yang berhasil dikuasai, melainkan seperti tukang kebun berkuasa atas kebonnya; ia berusaha supaya kebon itu hidup dan subur dan indah dan lestari.

luk-pemeluknya" - ditarik dari sila pertama, agar dalam teks paling dasar bangsa Indonesia tidak disebut satu agama, jangan-jangan para penganut agama-agama lain akan dianggap warga negara kelas dua. Dalam waktu hanya 15 menit lima tokoh itu, barangkali dengan hati berat, memberi persetujuan mereka. Sehingga sila pertama menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa*.

Dengan demikian Pancasila betul-betul memersatukan. Dengan mayoritas bersedia untuk tidak diberi kedudukan khusus - dan kita ingat: seluruh Undang-undang Dasar 1945 sekali pun tidak memberi keistimewaan apa pun kepada agama mayoritas - semua warga dan komunitas bangsa - yang begitu majemuk: ratusan etnik dan budaya dan sekian banyak agama dan orientasi keagamaan - merasa menjadi anggota bangsa Indonesia sepenuhnya dan ikut memiliki Indonesia itu.

Nah, di sini Katolik masuk. Umat Katolik Indonesia sudah sejak tahun 20-an abad ke-20 terlibat dalam kebangkitan nasional. Mereka merasa diikutsertakan. Dengan Pancasila umat Katolik ikut diakui sepenuhnya sebagai bangsa Indonesia dan co-pemilik Indonesia. Maka Pancasila didukung sebagai dasar suatu kenegaraan di mana umat Katolik seluruhnya diterima, dihormati, serta dijamin identitas dan kebebasannya. Pancasila dirangkul sebagai sesuatu yang sangat indah karena menunjukkan penerimaannya yang penuh, meski menjadi minoritas amat kecil, oleh dan dalam

bangsa Indonesia. Ancaman terhadap Pancasila oleh umat Katolik Indonesia juga akan dirasakan sebagai ancaman terhadap eksistensinya sendiri.

Sekaligus umat Katolik mensyukuri bahwa dengan Pancasila eksistensi dan identitas segenap komunitas di Indonesia diakui, dilindungi dan dihormati. Pancasila menjadi jaminan perdamaian antara komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Dengan adanya Pancasila kita dapat saling menerima serta berkomunikasi dengan saling mengakui. Banyak negara lain tidak mempunyai filsafat dasar negara seperti Indonesia ini.

LIMA SILA PANCASILA

Tadi kita memperhatikan fungsi Pancasila. Kalau sekarang kita sejenak melihat lima sila maka ada sesuatu yang mencolok. Ada empat prinsip yang secara internasional diakui sebagai prinsip etika politik paling dasar: Kebebasan beragama, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan sosial. Amat mencolok bahwa sila pertama, sila kedua, sila keempat dan sila kelima menampung empat prinsip etika pasca-tradisional itu. Adalah kejeniusnya Bung Karno bahwa ia merumuskan empat prinsip Pancasila sesuai dengan prinsip-prinsip dasar etika pasca tradisional – menurut perkiraan saya, tanpa menyadarinya. Justru itulah tanda bahwa Sukarno seorang jenius. Sedangkan sila ketiga mengungkapkan kenegaraan modern: Berbeda dengan ke-

negara tradisional-feodal tradisional, negara bukan sekedar kekuasaan di atas, melainkan negara kebangsaan, negara milik bangsa (sesuatu yang untuk pertama kali kelihatan di tahun 1790 waktu tentara Revolusi Prancis mengalahkan koalisi raja-raja Eropa yang mau menghancurkannya). Begitu NKRI bukan sekedar sebuah unit administratif bangsa Indonesia, melainkan bangsa Indonesia mengidentifikasikan diri dengannya, mencintainya, merasa sedih kalau negara kelihatan kalah (misalnya kalah sepakbola), dan bersedia berkorban dan seperlunya bahkan bersedia mati bagi negaranya.

Ternyata Pancasila mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan pasca-tradisional universal. Dan nilai-nilai itulah yang didukung juga oleh Gereja Katolik.

Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, mengungkapkan kebebasan beragama yang dalam Konsili Vatikan II, dalam dokumen *Dignitatis Humanae*, dihormati sebagai hak yang wajib. Sila pertama, justru dengan tidak memberi kedudukan khusus kepada suatu agama tertentu, menjamin kebebasan suara hati. Memang, sila pertama juga menyatakan bahwa sebuah ideologi ateis tidak akan mendapat tempat di Indonesia. Tetapi sila pertama tidak bicara tentang apakah seseorang secara individual percaya atau tidak pada Tuhan. Melainkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi religiositasnya.

Sila kedua, *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, menyatakan bahwa hubungan antar manusia harus berdasarkan keadilan, harus beradab dan harus manusiawi. Dalam kerangka etika pasca-tradisional tuntutan kemanusiaan berarti hormat pada hak-hak asasi manusia. Kita boleh bersyukur bahwa sebagai akibat reformasi hak-hak asasi manusia sekarang diberi kedudukan kuat dalam undang-undang dasar kita. Dan di abad ke-21 ini kita boleh, seperti saya tunjukkan di atas, menambah bahwa manusia juga wajib bertanggungjawab atas keutuhan lingkungannya. Bisa dikatakan, sila kedua itu adalah sila paling berbobot karena mengungkapkan sikap dasar kita, manusia, terhadap manusia lain, maupun terhadap alam daripadanya kita hidup. Suatu sila yang luar biasa kaya dan bagus rumusannya. Dengan demikian sila kedua Pancasila itu menampung empat dari tujuh prinsip etika politik Katolik: Prinsip kebaikan hati, berpihakan pada kehidupan, hormat terhadap hak-hak asasi manusia serta tanggungjawab atas keutuhan lingkungan hidup.

Sila ketiga, *Persatuan Indonesia*, dengan mudah memuat dan mendukung prinsip ketiga, kesejahteraan umum, dengan prinsip keempat, solidaritas, tetapi juga prinsip keenam, subsidiaritas.

Sedangkan sila keempat, *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*, mengungkapkan tuntutan bahwa Indonesia harus dipimpin

secara demokratis, yang dalam tujuh prinsip etika Katolik termasuk hak-hak asasi manusia dan secara eksplisit dimuat dalam dokumen *Gaudium et Spes* Konsili Vatikan II. Bahwa Indonesia sebagai hasil Reformasi secara konstitusional memastikan sifat demokratisnya tentu merupakan suatu kegembiraan.

Sila kelima, *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, adalah sama dengan prinsip keempat etika sosial-politik Katolik, solidaritas, yang menjadi dasar etis keadilan sosial. Bangsa Indonesia harus merupakan komunitas yang solider: kita hanya maju, kalau kita maju bersama, kita tidak akan mengizinkan ada sebagian bangsa yang ditinggalkan dalam kemiskinan, keterbelakangan, apalagi terdiskriminasi atau tertindas.

PENUTUP

Pancasila tidak perlu diragukan lagi. Pancasila mengangkat prinsip-prinsip dasar etika pasca-tradisional serta sesuai dengan tuntutan kehidupan bersama agama-agama. Dari sudut agama Katolik Pancasila merupakan sebuah mutiara. Pancasila tidak hanya menjamin bahwa umat Katolik sendiri mantap bertanah-air di Indonesia, sebagian integral bangsa Indonesia. Melainkan mengungkapkan nilai-nilai paling dasar yang menurut iman Katolik perlu mendasari hubungan antar manusia. Karena itu Pancasila didukung tidak hanya karena alasan pragmatis, melainkan karena alasan prinsipil.

Bangsa Indonesia boleh dengan gembira dan bangga berdasarkan diri pada lima sila Pancasila. Tentu saja, Pancasila juga merupakan tantangan tak habis-habis agar kita bersama membuat nyata yang dituntut di dalamnya.■

